

Pengaruh Koneksi Politik dan *Financial Constraint* Terhadap Agresivitas Pajak

Resyifa Putri Pramesti¹, Diarany Sucahyati²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21013010310@student.ac.id¹, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of political connections and financial constraints on tax aggressiveness, as well as to analyze the interaction between the two. In addition, the study explores the varying effects of political connections and financial constraints on tax aggressiveness based on industry sector classifications. The background of this research is based on the increasing attention toward tax avoidance practices among corporations, particularly in the context of companies with ties to political power and those facing financial pressure. This research adopts a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The sample consists of 2,041 observations of non-financial and non-banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019–2022. The sampling technique used is purposive sampling based on specific criteria, and tax aggressiveness is measured using two proxies: the Effective Tax Rate (ETR) and the Cash Effective Tax Rate (CETR). Interaction tests and sectoral analysis are also employed to identify effects under specific conditions and sectors. The results of the study indicate that neither political connections nor financial constraints have a significant overall effect on tax aggressiveness. However, both variables show significant effects in several specific sectors. Furthermore, the interaction between political connections and financial constraints is found to increase the likelihood of companies engaging in aggressive tax planning.

Keywords: Tax Aggressiveness, Financial Constraint, Political Connections

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak, serta menganalisis interaksi antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi masing-masing variasi pengaruh dari koneksi politik dan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak berdasarkan klasifikasi sektor industri. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya perhatian terhadap praktik penghindaran pajak di kalangan korporasi, khususnya dalam konteks perusahaan yang memiliki hubungan dengan kekuasaan politik dan menghadapi tekanan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan sebanyak 2.041 observasi perusahaan non-keuangan dan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019–2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, dan pengukuran agresivitas pajak menggunakan dua proksi, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Uji interaksi dan analisis sektoral turut digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh dalam kondisi dan sektor tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik koneksi politik maupun *financial constraint* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak secara keseluruhan. Namun, keduanya menunjukkan pengaruh signifikan pada beberapa sektor

tertentu. Selain itu, interaksi antara koneksi politik dan *financial constraint* terbukti meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif.

Kata kunci: Agresivitas pajak, *Financial Constraint*, Koneksi Politik

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam membiayai pembangunan negara sekaligus alat fiskal yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, pajak menyumbang sebagian besar penerimaan negara, yang digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial. Namun, efektivitas sistem perpajakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait tingkat kepatuhan dan besarnya *tax ratio* yang belum mencapai target ideal.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif reformasi perpajakan, termasuk digitalisasi administrasi, transparansi pelaporan, dan kebijakan insentif fiskal. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, pencapaian target penerimaan pajak masih fluktuatif dan belum konsisten, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2023

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan pajak.go.id

Tahun	Target (Rp triliun)	Realisasi (Rp triliun)	Persentase Pencapaian (%)	Tax ratio (%)
2018	1.424,0	1.315,9	92,4	11,5
2019	1.577,6	1.332,1	84,5	9,7
2020	1.642,6	1.285,1	78,2	8,3
2021	1.229,6	1.277,5	103,9	9,1
2022	1.485,0	1.716,8	115,6	10,4
2023	1.718,0	1.869,2	108,8	10,2

Penurunan *tax ratio* secara signifikan dari 11,5% pada 2018 menjadi 8,3% pada 2020 mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem perpajakan, termasuk potensi meningkatnya praktik penghindaran pajak. Meski realisasi penerimaan pajak mengalami perbaikan pasca-pandemi, *tax ratio* belum kembali ke tingkat yang ideal. Fenomena ini menjadi indikasi penting adanya praktik agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) yang dilakukan oleh entitas usaha. Direktorat Jenderal Pajak (2024) melaporkan bahwa berdasarkan laporan Tax Justice Network (2023), Indonesia mengalami kerugian setidaknya 2,74 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 44 triliun akibat praktik penghindaran pajak korporasi. Strategi penghindaran ini dapat dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) maupun melalui eksploitasi celah peraturan yang belum diatur secara eksplisit.

Dalam konteks ini, dua faktor penting yang diduga mempengaruhi kecenderungan agresivitas pajak adalah koneksi politik dan keterbatasan keuangan (*financial constraint*). Perusahaan dengan koneksi politik dinilai memiliki keunggulan informasi dan perlakuan khusus dari regulator, yang memungkinkan mereka menjalankan strategi perpajakan yang lebih agresif. Namun, terdapat pula bukti bahwa pengawasan ketat terhadap perusahaan berkoneksi politik dapat menurunkan agresivitas pajak karena pertimbangan reputasi. Sementara itu, *financial constraint* mendorong perusahaan untuk mengurangi kewajibannya sebagai strategi mempertahankan likuiditas. Tekanan keuangan sering kali memaksa manajemen untuk mengoptimalkan biaya, termasuk melalui perencanaan pajak yang agresif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti peran koneksi politik dan *financial constraint* perusahaan dalam memengaruhi praktik agresivitas pajak. Rudyanto dkk. (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan aktor politik sering kali memperoleh kemudahan dalam hal perpajakan, seperti akses terhadap informasi kebijakan, pengurangan risiko pemeriksaan, hingga peluang mendapatkan perlakuan istimewa dari regulator. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Hajriati dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa koneksi politik mampu meningkatkan agresivitas pajak karena perusahaan merasa lebih terlindungi dari tekanan otoritas. Di sisi lain, hasil penelitian Satiti dkk. (2021) dan Putra & Suhardianto (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan afiliasi politik justru cenderung menurunkan tingkat agresivitas pajaknya, terutama karena tekanan reputasi dan ekspektasi publik terhadap transparansi serta akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak masih bersifat ambivalen, tergantung pada konteks sosial, tata kelola perusahaan, dan persepsi risiko reputasional. Ketidakkonsistenan hasil ini mengindikasikan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki dinamika politik dan institusi fiskal yang unik.

Selain faktor politik, kondisi finansial perusahaan juga terbukti memainkan peran penting dalam menentukan strategi perpajakan. *Financial constraint* atau keterbatasan pendanaan dapat mendorong manajemen untuk mengoptimalkan efisiensi arus kas dengan cara menekan pengeluaran termasuk pajak. Adela dkk. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tekanan likuiditas yang tinggi lebih cenderung menggunakan pendekatan penghindaran pajak untuk menjaga kelangsungan operasional. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada penurunan *tax ratio* secara nasional jika dilakukan secara luas dan sistematis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji interaksi antara koneksi politik dan *financial constraint* sebagai determinan dari perilaku agresivitas pajak, terutama dalam konteks sektor bisnis di negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh koneksi politik dan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak perusahaan-perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Pendekatan sektoral berdasarkan klasifikasi *Standard Industrial Classification* (SIC) juga digunakan untuk mengevaluasi apakah pengaruh kedua variabel tersebut bersifat seragam di seluruh sektor atau bervariasi. Pendekatan sektoral ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai dinamika agresivitas pajak di Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, ketika dilakukan analisis berdasarkan sektor industri, ditemukan bahwa pengaruh tersebut justru signifikan pada beberapa sektor tertentu seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur makanan dan perabotan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan sektoral mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika agresivitas pajak di Indonesia, terutama dalam melihat peran koneksi politik di masing-masing sektor. Selain itu, hasil uji interaksi menunjukkan bahwa koneksi politik dan *financial constraint* secara simultan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa pengaruh koneksi politik menjadi lebih kuat ketika perusahaan berada dalam tekanan keuangan, sehingga mendorong manajemen untuk merancang strategi perpajakan yang lebih agresif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penghindaran pajak di negara berkembang, serta memberikan implikasi kebijakan bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang strategi kepatuhan dan pengawasan perpajakan yang lebih efektif.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dkk. (1976) menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik kepentingan) dan *agent* (pengelola), di mana konflik dapat timbul akibat perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi. Dalam konteks perpajakan, teori agensi tipe III digunakan untuk melihat dinamika antara perusahaan sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal*. Perusahaan berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin untuk memaksimalkan laba, sedangkan pemerintah menginginkan untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal guna membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada keberadaan individu dalam struktur pengelolaan perusahaan yang memiliki latar belakang atau afiliasi dengan jabatan politik. Faccio (2006; 2010) mendefinisikan koneksi politik sebagai keterlibatan langsung pemangku kekuasaan dalam kepengurusan perusahaan, seperti komisaris, direksi, atau anggota komite audit. Dalam konteks Indonesia, klasifikasi ini diperluas dengan mengacu pada definisi *Politically Exposed Person (PEP)* sesuai Peraturan Bank

Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, penjelasan Pasal 11, yang mencakup pejabat tinggi negara, eksekutif partai politik, dan kerabat dekat mereka (Harymawan dkk., 2019).

Financial Constraint

Financial constraint mencerminkan kondisi di mana perusahaan menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendanaan eksternal atau mengalami tekanan likuiditas yang tinggi (Adela dkk. 2023). Dalam situasi ini, perusahaan lebih cenderung menjalankan strategi efisiensi biaya, salah satunya dengan mengurangi beban pajak melalui agresivitas pajak. Firmansyah & Bayuaji (2019) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tekanan keuangan cenderung lebih oportunistik dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak mengacu pada strategi perusahaan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan yang agresif namun masih berada dalam batas legal (Frank dkk. 2009). Tindakan ini dapat berupa optimalisasi potongan pajak, manipulasi laporan keuangan, atau eksploitasi ketentuan pajak yang ambigu. Walaupun tidak selalu melanggar hukum, praktik ini meningkatkan risiko reputasi dan hukum bagi perusahaan, serta berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

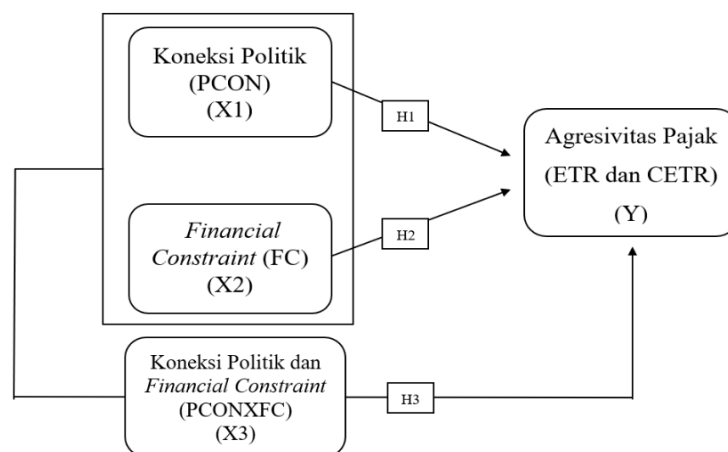
Hipotesis

H₁: Koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H₂: *Financial constraint* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H₃: Koneksi politik dan *financial constraint* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengestimasi parameter hubungan serta menguji hipotesis secara empiris. Objek dalam studi ini adalah agresivitas pajak, yang dianalisis berdasarkan pengaruh koneksi politik dan

financial constraint. Sementara itu, subjeknya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Data dari perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Variabel kontrol merupakan variabel tambahan yang diterapkan untuk mengendalikan pengaruh faktor lain di luar variabel utama, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dianalisis secara lebih akurat. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Variabel kontrol yang digunakan meliputi *Return on Asset*, pertumbuhan penjualan, belanja modal, intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit dan persentase eksekutif manajer wanita. Tabel 2 menampilkan pengukuran variabel.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Variabel Dependen		
Agresivitas Pajak (ETR dan CETR)	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR) = Beban pajak / laba sebelum pajak <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) = Pajak dibayar tunai / laba sebelum pajak (Adela dkk. 2023; Lestari dkk. 2019; Chen dkk. 2010; Adhikari dkk. 2006).	Laporan keuangan
Variabel Independen		
Koneksi Politik (PCON)	Diukur menggunakan variabel <i>dummy</i> , dengan nilai 1 jika perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 jika tidak (Harymawan dkk. 2019; PEP BI, 2010; Faccio, 2006; 2010).	Laporan tahunan
<i>Financial constraint</i> (FC)	$FC_{it} = -0.091 \times (cash\ flow/TA) - 0.062 \times (1\ if\ dv > 0, 0\ if\ dv = 0) + 0.021 \times (LTD/TA) - 0.044 \times \ln TA - 0.035 \times SG$ Dimana: <i>Cash flow</i> = Aktivitas Operasional, <i>TA</i> = Total Aset t, <i>dv</i> = Dividen yang dibayarkan t, <i>LTD</i> = Jumlah Hutang Jangka Panjang t, <i>SG</i> (<i>Sales Growth</i>) = (Penjualan t - Penjualan t-1) / Penjualan t-1 (Adela dkk 2023; Firmansyah & Bayuaji, 2019; Whited & Wu, 2006 ; Hennessy dkk. 2007)	Laporan keuangan
Variabel Kontrol		
<i>Return of Asset</i> (ROA)	Laba bersih / total aset (Satiti et a, 2021; Adhikari dkk. 2006).	Laporan keuangan
Pertumbuhan Penjualan (SG)	(Penjualan t - penjualan t-1) / penjualan t-1 (Rudyanto dkk 2023).	Laporan keuangan
Belanja Modal (CAPEX)	((Aset tetap t - aset tetap t-1) + penyusutan) / total aset (Rudyanto dkk. 2023; Ullah dkk. 2021; Kuan dkk. 2012)	Laporan keuangan

Intensitas Modal (CIN)	Aset tetap / total aset (Satiti dkk. 2021; Adhikari dkk. 2006).	Laporan keuangan
Leverage (LEV)	Total utang / total aset (Lestari dkk. 2019; Weston & Copeland, 2011).	Laporan keuangan
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Logaritma natural dari total aset perusahaan (Satiti dkk. 2021; Adhikari dkk. 2006).	Laporan keuangan
Kualitas Audit (BIG4)	Variabel ini diukur menggunakan variabel <i>dummy</i> , dengan nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP BIG4 dan 0 jika tidak (Indarti & Widiatmoko, 2023).	Laporan keuangan
Persentase Eksekutif Manajer Wanita (WEMP)	Jumlah wanita sebagai manajer eksekutif / total manajer eksekutif (Cortellese, 2022)	Laporan tahunan
Year Fix Effect (YEAR)	2019 - 2023	Laporan keuangan
Industry Fix Effect (INDUSTRY)	SIC Primary code 0-8	Laporan keuangan
Error term (ϵ)		

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria: (1) perusahaan aktif selama periode 2019–2023, (2) bukan dari sektor keuangan dan perbankan, dan (3) memiliki data laporan keuangan dan tahunan yang lengkap. Hasil seleksi data pada Tabel 3 menghasilkan total sampel sebanyak 2.041 observasi dari 579 perusahaan.

Tabel 3. Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023	953	953	953	953	953	4.765 observasi
Dikecualikan:						
Perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(875 observasi)
Perusahaan yang tidak lengkap data keuangannya	(408)	(432)	(374)	(311)	(324)	(1.849 observasi)
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian	370	346	404	467	454	2.041 observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 2.041 observasi dari 579 perusahaan non-keuangan dan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Sampel tersebar dalam delapan sektor industri berdasarkan klasifikasi *Standard Industrial Classification* (SIC). Sektor dengan jumlah observasi tertinggi adalah manufaktur makanan dan perabotan, diikuti oleh transportasi dan barang publik, serta manufaktur kimia dan elektronik. Panel A Tabel 4 menyajikan distribusi tersebut secara rinci berdasarkan industri dan tahun. Sedangkan Panel B Tabel 4 menggambarkan distribusi jumlah observasi berdasarkan klasifikasi kepemilikan koneksi politik. Distribusi perusahaan dengan koneksi politik cukup signifikan pada sektor-sektor yang berhubungan erat dengan proyek pemerintah dan regulasi strategis.

Tabel 4. Distribusi Sampel Penelitian

Panel A. Distribusi Sampel Penelitian berdasarkan Industri dan Tahun						
Industri	Tahun					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (SIC 0)	15	19	26	27	27	114
Pertambangan dan Konstruksi (SIC 1)	62	47	55	63	61	288
Manufaktur Makanan & Perabotan (SIC 2)	84	79	93	106	99	461
Manufaktur Kimia & Elektronik (SIC 3)	58	53	58	63	64	296
Transportasi & Barang Publik (SIC 4)	66	56	58	65	65	310
Penjualan Grosir & Eceran (SIC 5)	41	41	51	64	59	256
Jasa Bisnis, Hotel, dan Hiburan (SIC 7)	35	42	50	61	64	252
Jasa Hukum, Kesehatan, dan Sosial (SIC 8)	9	9	13	18	15	64
Total	370	346	404	467	454	2.041

Panel B. Distribusi Sampel Penelitian berdasarkan Industri dan Perusahaan yang Memiliki dan Tidak Memiliki Koneksi Politik			
Industri	Tidak memiliki koneksi politik	Memiliki koneksi politik	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (SIC 0)	68	64	114
Pertambangan dan Konstruksi (SIC 1)	167	121	288

Manufaktur Makanan & Perabotan (SIC 2)	360	101	461
Manufaktur Kimia & Elektronik (SIC 3)	211	85	296
Transportasi & Barang Publik (SIC 4)	197	113	310
Penjualan Grosir & Eceran (SIC 5)	199	57	256
Jasa Bisnis, Hotel, dan Hiburan (SIC 7)	178	74	252
Jasa Hukum, Kesehatan, dan Sosial (SIC 8)	29	35	64
Total	1.409	632	2.041

Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum data sebelum pengujian inferensial dilakukan. Sebanyak 31% perusahaan dalam sampel memiliki koneksi politik, sedangkan sisanya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor politik dalam struktur perusahaan masih terbatas secara proporsional. Nilai *financial constraint* yang dihitung dengan indeks Whited & Wu menunjukkan rata-rata negatif, yang mencerminkan tekanan keuangan yang cukup merata di antara perusahaan dalam sampel. Sebagian besar perusahaan mengalami keterbatasan finansial yang dapat berdampak pada strategi efisiensi, termasuk dalam pengelolaan pajak. Rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 12,8% dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang lebih rendah bahkan bernilai negatif, menunjukkan potensi praktik penghindaran pajak yang cukup luas. Variasi nilai ekstrem pada kedua indikator memperkuat indikasi adanya perusahaan dengan strategi perpajakan yang sangat agresif.

Variabel kontrol menunjukkan keberagaman kondisi keuangan dan operasional perusahaan. ROA dan pertumbuhan penjualan menunjukkan variasi yang besar, mencerminkan perbedaan kinerja antar perusahaan. Struktur modal, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan juga menunjukkan heterogenitas yang tinggi. Hanya sekitar 27% perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four, dan partisipasi perempuan dalam posisi manajerial masih relatif rendah, meskipun terdapat perusahaan yang mencatatkan tingkat keterwakilan gender yang cukup tinggi.

Tabel 5. Statistika Deskriptif

	Mean	Median	Minimum	Maximum
PCON	0.310	0.000	0.000	1.000
FC	-1.248	-1.246	-1.480	-0.994
ETR	0.128	0.153	-1.930	1.815
CETR	-0.234	-0.110	-7.615	2.799
ROA	2.648	2.550	-44.330	43.070
SG	0.387	0.065	-0.996	104.289

CAPEX	0.048	0.042	-41.153	0.823
CIN	0.550	0.564	0.016	0.977
LEV	1.253	0.706	-10.314	23.872
SIZE	28.157	28.070	22.826	32.316
BIG4	0.271	0.000	0.000	1.000
WEMP	4.492	4.000	1.000	17.833

Uji Karakteristik Perusahaan (*Independent T-Test*)

Uji *Independent T-Test* dilakukan untuk membandingkan karakteristik perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan yang tidak. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada beberapa variabel utama. Perusahaan dengan koneksi politik tercatat memiliki tingkat *financial constraint* yang lebih tinggi, serta cenderung memiliki intensitas modal (CIN), ukuran perusahaan (SIZE), dan proporsi audit oleh KAP Big Four (BIG4) yang lebih besar. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan dalam posisi manajerial (WEMP) juga lebih tinggi pada kelompok ini, menunjukkan kecenderungan perusahaan berkoneksi politik untuk lebih inklusif dalam aspek gender. Sebaliknya, tidak ditemukan perbedaan signifikan pada variabel agresivitas pajak (ETR dan CETR), profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan *Leverage* (LEV). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik belum tentu berkorelasi langsung dengan praktik agresivitas pajak, sehingga diperlukan analisis regresi lanjutan untuk menguji pengaruh kausal yang lebih spesifik.

Tabel 6. Karakteristik Perusahaan (*Independent T-Test*)

	Rata-rata perusahaan terkoneksi politik	Rata-rata perusahaan tidak terkoneksi politik	Coef	t-value
FC	-1.229	-1.288	0.058***	14.442
ETR	0.125	0.133	-0.008	-0.468
CETR	-0.215	-0.275	0.060	1.316
ROA	2.734	2.455	0.279	0.558
SG	0.350	0.469	-0.119	-0.570
CAPEX	0.039	0.069	-0.031	-0.697
CIN	0.536	0.581	-0.045***	-3.832
LEV	1.279	1.194	0.085	0.563
SIZE	27.731	29.107	-1.376***	-16.358
BIG4	0.216	0.392	-0.176***	-8.407
WEMP	4.113	5.338	-1.226***	-12.572

Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengevaluasi hubungan linear antar variabel utama. Hasil menunjukkan bahwa koneksi politik (PCON) tidak memiliki korelasi signifikan terhadap agresivitas pajak, baik yang diukur melalui *Effective Tax*

Rate (ETR) maupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Temuan ini mendukung hasil Lestari dkk. (2019) yang menemukan bahwa keberadaan koneksi politik belum tentu berkaitan langsung dengan perilaku penghindaran pajak. PCON menunjukkan korelasi positif signifikan dengan ukuran perusahaan (SIZE) dan persentase manajer perempuan (WEMP), yang mengindikasikan bahwa perusahaan berkoneksi politik cenderung lebih besar dan lebih inklusif secara gender. Sebaliknya, *financial constraint* (FC) berkorelasi negatif dengan koneksi politik, profitabilitas (ROA), dan pertumbuhan penjualan (SG), mencerminkan bahwa perusahaan dengan tekanan finansial lebih besar cenderung memiliki kinerja dan akses politik yang lebih terbatas.

Hubungan negatif yang signifikan antara ETR dan CETR menunjukkan bahwa kedua indikator agresivitas pajak saling melengkapi. Korelasi moderat antara SIZE dengan BIG4 dan WEMP juga menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung diaudit oleh KAP ternama dan memiliki representasi gender yang lebih baik. Namun demikian, karena korelasi hanya mengukur hubungan linear tanpa memperhitungkan variabel kontrol, pengujian lebih lanjut melalui regresi diperlukan untuk mengidentifikasi pengaruh kausal antar variabel.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh koneksi politik, *financial constraint*, dan interaksi keduanya terhadap agresivitas pajak, yang diukur dengan dua indikator, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Analisis dilakukan menggunakan bantuan *software* STATA 17.0 dengan pendekatan *robust standard error* dan pengelompokan pada level perusahaan (*vce(cluster id2)*) untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam data panel.

$$ETR_{i,t} = \alpha + \beta1PCON_{i,t} + \beta2FC_{i,t} + \beta3ROA_{i,t} + \beta4SG_{i,t} + \beta5CAPEX_{i,t} + \beta6CIN_{i,t} + \beta7LEV_{i,t} + \beta8SIZE_{i,t} + \beta9BIG4_{i,t} + \beta10WEMP_{i,t} + \beta11YEAR + \beta12INDUSTRY + \varepsilon \quad (1)$$

$$CETR_{i,t} = \alpha + \beta1PCON_{i,t} + \beta2FC_{i,t} + \beta3ROA_{i,t} + \beta4SG_{i,t} + \beta5CAPEX_{i,t} + \beta6CIN_{i,t} + \beta7LEV_{i,t} + \beta8SIZE_{i,t} + \beta9BIG4_{i,t} + \beta10WEMP_{i,t} + \beta11YEAR + \beta12INDUSTRY + \varepsilon \quad (2)$$

$$ETR_{i,t} = \alpha + \beta1PCONXFC_{i,t} + \beta2PCON_{i,t} + \beta3FC_{i,t} + \beta4ROA_{i,t} + \beta5SG_{i,t} + \beta6CAPEX_{i,t} + \beta7CIN_{i,t} + \beta8LEV_{i,t} + \beta9SIZE_{i,t} + \beta10BIG4_{i,t} + \beta11WEMP_{i,t} + \beta12YEAR + \beta13INDUSTRY + \varepsilon \quad (3)$$

$$CETR_{i,t} = \alpha + \beta1PCONXFC_{i,t} + \beta2PCON_{i,t} + \beta3FC_{i,t} + \beta4ROA_{i,t} + \beta5SG_{i,t} + \beta6CAPEX_{i,t} + \beta7CIN_{i,t} + \beta8LEV_{i,t} + \beta9SIZE_{i,t} + \beta10BIG4_{i,t} + \beta11WEMP_{i,t} + \beta12YEAR + \beta13INDUSTRY + \varepsilon \quad (4)$$

Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda terhadap Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah, 2025

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ETR	CETR	ETR	CETR
PCONXFC			-0.450**	-0.362

			(-2.23)	(-0.55)
PCON	-0.003	-0.064	-0.572**	-0.522
	(-0.16)	(-1.10)	(-2.19)	(-0.61)
FC	0.123	0.619	0.250	0.722
	(0.49)	(0.49)	(0.98)	(0.55)
ROA	0.004***	-0.004**	0.004***	-0.004**
	(4.81)	(-2.20)	(4.83)	(-2.19)
SG	0.001	0.003	0.001	0.003
	(1.01)	(0.61)	(0.79)	(0.60)
CAPEX	0.007***	-0.010*	0.007***	-0.010
	(3.51)	(-1.66)	(3.95)	(-1.51)
CIN	0.008	0.199*	0.008	0.198*
	(0.20)	(1.93)	(0.19)	(1.93)
LEV	-0.012***	0.017**	-0.012***	0.017**
	(-3.24)	(2.33)	(-3.28)	(2.31)
SIZE	0.013	0.032	0.012	0.031
	(1.06)	(0.57)	(1.01)	(0.56)
BIG4	0.019	-0.066	0.019	-0.066
	(0.91)	(-1.12)	(0.90)	(-1.12)
WEMP	0.005	-0.003	0.003	-0.004
	(1.01)	(-0.24)	(0.69)	(-0.32)
CONSTANT	-0.064	-0.349	0.120	-0.201
	(-0.40)	(-0.82)	(0.68)	(-0.42)
YEAR Dummies	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk
Industry Dummies	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Termasuk
R-Squared	0.052	0.014	0.055	0.014
Jumlah observasi	2041	2041	2041	2041

t statistics in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, baik ketika diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) maupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak didukung oleh data empiris. Temuan ini mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak dapat dijadikan determinan tunggal dalam menjelaskan perilaku agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini juga selaras dengan studi Lestari dkk. (2019), yang menyimpulkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa koneksi politik memerlukan kehadiran kondisi pendukung tertentu agar dapat mempengaruhi keputusan perpajakan secara nyata.

Meskipun tidak signifikan secara umum, analisis sektoral menunjukkan hasil yang lebih kompleks. Dalam sektor pertanian, kehutanan, perikanan (SIC 0), serta manufaktur makanan dan perabotan (SIC 2), koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Karena CETR yang lebih rendah menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih besar, hasil ini mengindikasikan bahwa pada sektor-sektor tertentu, koneksi politik berperan dalam mendorong praktik perpajakan yang lebih agresif. Hal ini dapat dijelaskan oleh kedekatan sektor-sektor tersebut dengan kebijakan publik serta tingginya intensitas regulasi, yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan koneksi politik sebagai sumber fleksibilitas fiskal.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan pentingnya memperhatikan posisi aktor politik dalam struktur perusahaan. Dalam konteks Indonesia, koneksi politik lebih sering ditemukan pada posisi komisaris daripada direksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki kewenangan penuh atas pengambilan keputusan operasional, termasuk strategi perpajakan, sedangkan komisaris berperan dalam fungsi pengawasan. Kehadiran figur politik pada jabatan komisaris dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol tambahan, yang justru membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Penelitian ini juga memperkuat argumen dari Satiti dkk. (2021) dan Rudyanto dkk. (2023), yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak selalu identik dengan penyalahgunaan kekuasaan fiskal. Dalam sistem tata kelola yang kuat, keberadaan aktor politik justru dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi perusahaan. Dengan demikian, pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh posisi struktural, sektor industri, serta karakteristik tata kelola masing-masing perusahaan.

Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan pengawasan pajak berbasis risiko yang mempertimbangkan konteks sektoral dan fungsi koneksi politik dalam perusahaan. Tidak semua bentuk koneksi politik bersifat oportunistik. Sebaliknya, perhatian regulator perlu difokuskan pada sektor-sektor yang secara struktural dekat dengan kebijakan publik atau memiliki regulasi tinggi, karena sektor-sektor inilah yang memiliki potensi lebih besar dalam memanfaatkan koneksi politik untuk strategi perpajakan yang agresif (Indarti & Widiatmoko, 2023; Hajriati dkk., 2024).

Pengaruh *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa *financial constraint* (FC) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak secara umum. Baik pada model dengan *Effective Tax Rate* (ETR) maupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai variabel dependen. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan keuangan yang dihadapi perusahaan tidak secara konsisten mendorong perilaku agresif dalam perencanaan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak didukung oleh data empiris.

Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa strategi perpajakan tidak selalu bergantung pada kondisi keuangan perusahaan semata. Dalam konteks lingkungan bisnis dengan pengawasan fiskal yang ketat atau tingkat kepatuhan tinggi, perusahaan yang mengalami keterbatasan finansial mungkin tetap memilih jalur konservatif dalam pengelolaan pajaknya. Hasil ini juga diperoleh setelah mengendalikan variabel-variabel kontrol seperti profitabilitas, ukuran, *leverage*, dan kualitas audit, sehingga memberikan dasar kuat bahwa pengaruh FC memang tidak bersifat universal.

Namun, analisis regresi berdasarkan sektor industri mengungkap dinamika yang lebih kompleks. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SIC 0), manufaktur kimia dan elektronik (SIC 3), jasa bisnis dan hiburan (SIC 7), serta jasa hukum, kesehatan, dan sosial (SIC 8), variabel *financial constraint* justru menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ETR dan CETR. Artinya, dalam sektor-sektor tersebut, perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan justru cenderung membayar pajak lebih tinggi, atau dengan kata lain, bersikap lebih hati-hati dan menghindari praktik perpajakan yang agresif.

Perbedaan ini menegaskan bahwa pengaruh *financial constraint* terhadap agresivitas pajak sangat dipengaruhi oleh konteks sektoral. Sektor-sektor yang memiliki intensitas regulasi tinggi atau hubungan erat dengan kebijakan publik sering kali dituntut menjaga legitimasi dan hubungan baik dengan regulator. Dalam konteks ini, tekanan keuangan justru mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan fiskal yang lebih besar sebagai bentuk mitigasi risiko non-keuangan, seperti kehilangan akses terhadap subsidi, insentif, atau perlakuan khusus.

Temuan ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya. Firmansyah & Bayuaji (2019) menemukan bahwa *financial constraint* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur dengan peluang investasi rendah. Sementara itu, Adela dkk. (2023) dalam konteks Ghana juga menunjukkan pengaruh positif antara *financial constraint* dan agresivitas pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efek *financial constraint* tidak dapat digeneralisasi lintas sektor maupun lintas negara, melainkan sangat dipengaruhi oleh tata kelola, ekspektasi sosial, serta tekanan regulasi yang melekat dalam lingkungan institusional perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh *financial constraint* terhadap agresivitas pajak bersifat kontekstual. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor sektoral dalam merancang strategi pengawasan dan insentif fiskal. Pendekatan yang terlalu umum berisiko gagal mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan atau justru memiliki insentif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tengah keterbatasan keuangan.

Peran Interaksi Koneksi Politik dan *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menguji apakah interaksi antara koneksi politik dan *financial constraint* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Analisis dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi (PCONXFC) ke dalam model regresi yang menggunakan ETR dan CETR sebagai indikator agresivitas pajak. Model ini menggabungkan variabel koneksi politik (PCON), *financial constraint* (FC), serta sejumlah variabel kontrol untuk menguji apakah kombinasi tekanan keuangan dan afiliasi politik meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi PCONXFC memiliki koefisien negatif yang signifikan terhadap ETR dan CETR. Karena nilai ETR dan CETR yang lebih rendah mencerminkan agresivitas pajak yang lebih tinggi, temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang sekaligus mengalami tekanan keuangan cenderung lebih agresif dalam strategi perpajakannya. Dengan kata lain, *financial constraint* memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap perilaku agresivitas pajak.

Temuan ini mendukung pandangan teori agensi tipe III, di mana perusahaan sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan ekonominya, termasuk melalui praktik penghindaran pajak, ketika menghadapi tekanan likuiditas. Dalam konteks ini, koneksi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap risiko regulasi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menurunkan beban pajak secara oportunistik, terutama ketika opsi efisiensi operasional lain terbatas.

Hasil ini konsisten dengan studi sebelumnya. Adela dkk. (2023) dan Hajriati dkk. (2024) menunjukkan bahwa koneksi politik dan *financial constraint* secara simultan mendorong peningkatan agresivitas pajak. Menurut Adela dkk. (2023), tekanan internal akibat keterbatasan keuangan dan akses eksternal melalui hubungan politik menciptakan insentif kuat bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah fiskal. Hajriati dkk. (2024) juga menekankan bahwa perusahaan dengan *financial constraint* lebih cenderung memaksimalkan keuntungan dari koneksi politik karena terbatasnya alternatif strategi efisiensi.

Namun demikian, penting dicatat bahwa efek *financial constraint* terhadap agresivitas pajak tidak bersifat universal. Dalam model sebelumnya, variabel FC tidak berpengaruh signifikan secara umum, tetapi menunjukkan pengaruh pada sektor-sektor tertentu yang memiliki regulasi ketat. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat pemahaman bahwa *financial constraint* menjadi faktor pendorong agresivitas pajak yang lebih kuat hanya ketika dikombinasikan dengan koneksi politik.

Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik bersifat kondisional. Ketika kondisi keuangan perusahaan stabil, koneksi tersebut belum tentu dimanfaatkan untuk praktik agresif. Sebaliknya, dalam tekanan likuiditas, koneksi politik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperluas ruang gerak oportunistik perusahaan. Sejalan dengan Rudyanto dkk. (2023), koneksi politik dapat menjadi instrumen untuk memperbesar kebebasan manajerial dalam mengambil keputusan oportunistik, termasuk dalam konteks pajak, terutama saat menghadapi tekanan keuangan.

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pengawasan fiskal yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Regulator pajak perlu memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan yang tidak hanya menghadapi tekanan keuangan, tetapi juga memiliki afiliasi politik. Pengawasan perlu mempertimbangkan konteks sektoral dan posisi fungsional individu yang memiliki hubungan politik dalam struktur perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengevaluasi strategi perpajakan mereka secara lebih bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap reputasi dan kepatuhan, dalam lanskap kebijakan fiskal yang semakin menekankan transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat relevansi teori agensi tipe III, khususnya mengenai bagaimana perusahaan sebagai agen merespons tekanan keuangan dan hubungan politik dalam konteks kebijakan perpajakan. Fakta bahwa koneksi politik baru signifikan saat dikombinasikan dengan *financial constraint* menunjukkan bahwa relasi politik tidak selalu berdampak langsung terhadap agresivitas pajak, melainkan bergantung pada kondisi internal dan karakter sektoral perusahaan. Secara praktis, hasil ini menyarankan perlunya pendekatan pengawasan fiskal berbasis risiko, yang mempertimbangkan kombinasi tekanan keuangan dan koneksi politik, terutama di sektor-sektor yang padat regulasi. Bagi perusahaan, penggunaan koneksi politik dalam strategi perpajakan perlu disikapi hati-hati karena berisiko menimbulkan konsekuensi reputasional dan peningkatan pengawasan. Oleh karena itu, transparansi dan tata kelola yang baik tetap menjadi strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik dan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak, serta menganalisis peran interaksi keduanya dalam berbagai sektor industri. Berdasarkan analisis terhadap 2.041 observasi dari 579 perusahaan non-keuangan dan non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022, ditemukan bahwa secara umum koneksi politik dan *financial constraint* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, ketika dianalisis berdasarkan sektor industri, keduanya menunjukkan pengaruh signifikan dalam konteks sektoral tertentu.

Koneksi politik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan agresivitas pajak di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta manufaktur makanan dan perabotan. Sementara itu, *financial constraint* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak pada sektor yang padat regulasi, seperti jasa sosial dan manufaktur elektronik. Yang paling menonjol, interaksi antara koneksi politik dan *financial constraint* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan finansial memperkuat kecenderungan perusahaan berkoneksi politik untuk menjalankan strategi perpajakan yang lebih agresif.

Secara keseluruhan, agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (tekanan keuangan), eksternal (koneksi politik), dan karakteristik sektoral. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa perilaku perpajakan tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, struktur tata kelola, dan intensitas pengawasan regulatif.

Saran praktis dari temuan ini ditujukan pada tiga pihak. Pertama, perusahaan disarankan untuk tidak semata mengandalkan koneksi politik dalam perencanaan pajak, terutama saat berada dalam tekanan keuangan, karena hal tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan intensif dari regulator. Kedua, bagi pembuat kebijakan, pendekatan pengawasan berbasis risiko perlu mempertimbangkan interaksi antara koneksi politik dan kondisi keuangan, serta menaruh perhatian lebih pada sektor-sektor dengan hubungan erat terhadap kebijakan publik. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, pengukuran koneksi politik sebaiknya mempertimbangkan peran aktif individu dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, serta membuka peluang penggunaan pendekatan kualitatif untuk mengungkap dimensi politik informal yang belum terjangkau oleh data kuantitatif.

Dengan mempertimbangkan hasil ini, penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi perpajakan yang lebih akuntabel, serta mendorong kebijakan fiskal yang adaptif terhadap konteks politik dan ekonomi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, V., Agyei, S. K., & Peprah, J. A. (2023). Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms: Evidence from an emerging economy. *Scientific African*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Cortellese, F. (2022). Does The Gender Composition Of The Board Of Directors Have Any Effect On Tax Aggressiveness In Western Countries? *Economics and Sociology*, 15(1), 11–22. <https://doi.org/10.14254/2071>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Jangan Jadi Pengemplang Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/penghindaran-pajak->
- Faccio, M. (2006). *Politically Connected Firms*. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>

- Faccio, M. (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, 39(3), 905–928. <https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01099.x>
- Firmansyah, A., & Bayuaji, R. (2019). Financial Constraints, Investment Opportunity Set, Financial Reporting Aggressiveness, Tax Aggressiveness: Evidence From Indonesia Manufacturing Companies. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5).
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hajriati, T., Rahman, A. F., & Rusydi, M. K. (2024). The Effect of Financial Constraints and Political Connections on Tax Aggressiveness with ESG Disclosure as a Moderating Variable. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 895–906. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i2.823>
- Harymawan, I., Nasih, M., Madyan, M., & Sucahyati, D. (2019). The role of political connections on family firms' performance: evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/ijfs7040055>
- Hennessy, C. A., Levy, A., & Whited, T. M. (2007). Testing Q theory with financing frictions. *Journal of Financial Economics*, 83(3), 691–717. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.12.008>
- Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2023). Political Connections and Tax Avoidance: Does Audit Quality Moderate The Relationship? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(2), 295–306. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i2>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kuan, T.-H., Li, C.-S., & Liu, C.-C. (2012). Corporate governance and cash holdings: A quantile regression approach. *International Review of Economics & Finance*, 24, 303–314. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2012.04.006>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- PEP BI. (2010). *Peraturan BI No. 12-3-PBI-2010*.
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>

- Rudyanto, A., Julisar, J., & Debora, D. (2023). Political connection as a double-edged sword: the case of tax aggressiveness practice during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(4), 400–410. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2023-0113>
- Satiti, A. D. R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political Connections And Tax Aggressiveness: The Role Of Gender Diversity As A Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 273–292. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
- Ullah, S., Khan, S., Hussain, S., Alam, M., & Haroon, M. (2021). Political Connections, Family Ownership, and Firm Performance: An Emerging Economy. *International Journal of the Economics of Business*, 28(3), 471–487. <https://doi.org/10.1080/13571516.2021.1941715>
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2011). *Manajemen Keuangan Jilid 2*.
- Whited, T. M., & Wu, G. (2006). Financial constraints risk. *Review of Financial Studies*, 19(2), 531–559. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhj012>